



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS MULAWARMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKA FIKRIAH
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 446791

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.086 m2/313 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/102 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/216 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 50.000.000

1. MOBIL, VIOS SEDAN Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 540.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 22.813.951

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.912.813.951

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.912.813.951

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.